

KEBANGKITAN DAN PERKEMBANGAN MADRASAH DI INDONESIA

Ali Anwar*

Abstrak

The origin of Madrasah in Indonesia is from surau, pesantren, or rangkang form. Madrasah emerge caused by challenge of Dutch referring to the ethical politics. Besides that it is also pushed by the existence of the effort completion of more conducive education system of its grad to get the equal opportunity to public school, especially job opportunity at the Colonial government and also the existence of moslim, that surprised to Western in sciences, economic, and technology.

A lot of Moslem scholar are meritorious in growth of madrasah. That way, Islamic organization founded many madrasahs, or at least added the public school with the religion subject, for example: Muhammadiyah, Jam`iyat Al-Khair, Al-Irsyad, Mathla` al-Anwar, Association of People Islam, PERTI, Nahdlatul Moslem scholar, Jamiyatul Wasiliyah. The first of Surau or of pesantren that innovated to be a madrasah system, or at least to be school, is Jembatan Besi Surau. It was in 1914.

The growth of madrasah in Indonesia was influenced by the ulama graduated from Middle East, Jama`ah Haji which lived in Mecca and Medina for a few moment, and an education system developed by colonial in Nusantara.

Growth of madrasah in Indonesia does not run well, this matter is caused by a number of matter, the most is their duty to teact the public subject matters and also the religion subject matters.

Kata Kunci: Kebangkitan, Perkembangan, Madrasah di Indonesia

Pendahuluan

Kebangkitan dan perkembangan madrasah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari upaya pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Sistem *halaqah* yang semula digunakan di surau, pesantren, dan lembaga sejenisnya, diperbaharui dengan sistem klasikal. Dari belajar secara bersama-sama, dirubah menjadi belajar berkelas dan bertingkat. Murid-murid duduk menurut kelas dan tingkat sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya. Dengan demikian, pendidikan dan pengajaran diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik.

Satu hal yang menarik dari fenomena madrasah di Indonesia bila dibandingkan dengan fenomena madrasah di Timur Tengah adalah, munculnya madrasah yang merupakan perkembangan dan peningkatan dari surau maupun pesantren adalah akibat sentuhan dengan sistem pendidikan modern Barat yang dikembangkan oleh kolonial. Sementara di Timur Tengah, madrasah merupakan bentuk baru yang final dari perkembangan institusi rumah, masjid, dan kuttab.

* Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri dan Asdir I Pascasarjana IAIT Kediri

Perubahan dari sistem *halaqah* menuju sistem klasikal ini juga dibarengi dengan perubahan hal-hal yang terkait dengan itu, misalnya metode pengajaran, kurikulum, pelaksanaan pengajaran, administrasi, dan pola pembiayaan. Adanya perubahan sistem ini tidak berarti bahwa sistem pendidikan lama hilang sama sekali, akan tetapi ada lembaga pendidikan yang di samping memberikan pendidikan berdasarkan sistem lama, juga memberikan sistem baru, dan bahkan ada yang senantiasa mempertahankan sistem lamanya, atau mendirikan lembaga baru dengan sistem yang baru pula.

Pembaharuan sistem pendidikan Islam ini setidaknya disebabkan oleh tiga hal; *Pertama*, Semakin banyaknya kaum muslimin yang dapat menunaikan ibadah haji dan meneruskan domisilinya untuk menuntut ilmu. Setelah mereka kembali ke tanah air, mereka berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang diketahui di Tanah suci.¹ Hal pertama ini menimbulkan hal yang *kedua*, masuknya cita-fikiran modern dalam Islam pada abad ke-20. Beberapa kalangan Islam menganggap penting soal administrasi dan organisasi, maka wajar kalau mereka mencoba memulai pengajaran yang terorganisasi disertai kurikulum yang jelas.² *Ketiga*, Adanya semangat nasionalisme dan patriotisme dari Umat Islam, di samping pengaruh sistem pendidikan Barat, sekolah nagari, yang mempunyai program yang lebih terkoordinasi dan sistematis dan mampu menghasilkan lulusan yang terampil.³

Makalah ini berusaha untuk mendapatkan informasi tentang beberapa hal. *Pertama*, kapan madrasah pertama kali didirikan, dan madrasah apa itu. *Kedua*, apa yang melatar belakangi didirikan madrasah itu. Apakah memang pengaruh dari Tanah Suci yang dibawa oleh Jama'ah Haji ataukah karena pengaruh penjajah, atau kedua-duanya. *Ketiga*, Pembaharuan apa saja yang dilaksanakan oleh madrasah. Apakah seluruh faktor dalam sistem pendidikan, baik tujuan, guru, murid, sarana dan prasarana, dan juga metodenya, atau hanya sebagian saja. *Keempat*, bagaimana perkembangan madrasah itu selanjutnya.

Metode yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan di atas adalah dengan menggali informasi dan data yang terdapat dalam buku-buku hasil penelitian peneliti yang mencurahkan perhatiannya terhadap masalah ini atau setidaknya menyinggung permasalahan

¹ Hampir seluruh pembaharu, kalau tidak dikatakan seluruhnya, adalah para Ulama yang pernah menuntut ilmu di tanah suci, misalnya Abdul Karim Amrullah, pencetus pembaharuan di Surau Jembatan Besi menjadi Perguruan Thawalib. Hal ini bisa dilihat pada H. M. D. Datuk Palimo Kayo, *Sejarah Perguruan Thawalib Padang Panjang*, Yayasan Thawalib, 1970, 6.

² Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Raja Wali, 1983, 49.

³ Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1995, 157. Dalam hal ini Steenbrink menganggap bahwa pembaharuan Islam di Indonesia disebabkan oleh 4 hal, *Pertama*, pengaruh pemikiran kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits yang dihembuskan oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, *Kedua*, semangat nasionalisme, *Ketiga*, Sebagai usaha umat Islam untuk memperkuat organisasi yang telah didirikannya, *Keempat*, ketidakpuasan umat Islam akan keadaan pendidikan Islam di Indonesia, lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Jakarta: LP3ES, 1986, 26-8.

yang sedang dikaji. Jadi, penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan, atau yang lazim disebut *Library Research*.

Sedangkan sistematika penulisan makalah ini dimulai dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan penelusuran tentang asal usul madrasah, faktor yang mempengaruhi dan melatar belakangi timbulnya fenomena madrasah, perkembangan madrasah pada masa-masa sesudahnya, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Asal-usul Berdirinya Madrasah

Sejak awal abad ke-20 masyarakat Islam di Minangkabau semakin terjepit. Di satu pihak, mereka menghadapi tekanan ekonomi dan politik yang semakin berat dari kolonial Belanda; sedang di lain pihak gagasan pembaharuan keagamaan dalam segala aspeknya, semakin gencar digaungkan.⁴ Kemudian perkembangan politik dan ekonomi pada saat itu menimbulkan perubahan-perubahan hebat pada institusi dan pranata sosial Minangkabau. Kaum aristokrat dan pegawai pemerintah dari kalangan pribumi mulai memperkenalkan gaya hidup Belanda. Pada tahun 1901 mereka mengeluarkan pokok-pokok pikiran yang bertujuan memajukan masyarakat Indonesia. Pokok-pokok pikiran berisi perombakan sistem pendidikan menjadi sistem pendidikan ala Barat. Sekolah-sekolah agama menurut mereka sudah ketinggalan zaman.⁵ Hal ini, merupakan salah satu sebab, diadakannya pembaharuan sistem pendidikan menjadi klasikal, madrasah dan sekolah.

Terkait dengan masalah madrasah apa yang pertama didirikan, masih belum ada kesepakatan. Mahmud Yunus menganggap bahwa lembaga pendidikan yang pertama kali menerapkan sistem klasikal adalah Sekolah adabiyah (*Adabiyah School*) di Padang Panjang.⁶ Pada mulanya sekolah ini didirikan di Padang pada tahun 1907 oleh Haji Abdullah Ahmad. Karena sifatnya berbeda sekali dengan surau, yakni menggunakan papan tulis, meja dan bangku, maka ia mendapat reaksi dan tantangan yang keras dari masyarakat. Setelah dua tahun bertahan, akhirnya ia menutup sekolah tersebut dan pindah ke Padang, mendirikan sekolah yang sama pada tahun 1909.⁷ Sementara Karel A. Steenbrink menganggap bahwa pembaharuan pendidikan Islam dimulai dari kota kecil, yakni Padang Panjang. Bermula dari sebuah pengajian yang dilaksanakan mulai sebelum tahun 1900 di surau⁸ Jembatan Besi yang

⁴ Azyumardi Azra, "Surau di Tengah Krisis: Pesantren dalam Perspektif Masyarakat", dalam M. Dawam Rahardja (Ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun daeri Bawah*, Jakarta: P3M, 1985, 164.

⁵ *Ibid.*, 166.

⁶ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1985, 63.

⁷ Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatra Thawalib*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990, 82.

⁸ Kata Surau merupakan istilah yang digunakan dalam bahasa sehari-hari di Minangkabau, Batak, Sumatra Tengah, Sumatra Selatan, Malaysia, dan Patani di Tailan Selatan; lihat Azyumardi Azra, *The Rise and the Decline of the Minangkabau Surau: A Thaditional Islamic Educational Institution in West Sumatra during the Dutch Colonial Government*, Thesis, Columbia University, 1988, 19; Sementara Dobbin mengungkapkan bahwa Istilah Surau telah digunakan sebelum datangnya Islam. Ia merupakan tempat yang dibangun untuk tempat ibadah oleh Hindu-Budha, lihat Christine Dobbin,

dirintis oleh Haji Abdullah Ahmad. Setelah kepemimpinan beralih ke tangan Haji Abdul Karim Amrullah, pada tahun 1911, pengajian itu semakin ramai diikuti orang dari berbagai daerah di Sumatra Barat. Kemudian pengajian itu meningkatkan diri, dari segi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, dan akhirnya melahirkan Perguruan Thawalib Padang Panjang pada tahun 1914 yang terdiri dari tujuh kelas dengan sistem persekolahan.⁹

Pendapat di atas bisa dianggap benar kalau ditinjau dari segi pembaharuan pendidikan dari sistem lama, *halaqah*, yang banyak digunakan oleh lembaga pendidikan Islam pada waktu itu kepada sistem baru, klasikal. Akan tetapi bila ditinjau dari didirikannya madrasah sendiri, maka sebelumnya Jamiyatul Khair¹⁰ terlebih dahulu telah mendirikan lembaga pendidikan dengan menggunakan sistem klasikal. Walaupun penulis tidak menemukan kepastian tahun organisasi ini mendirikan madrasah, akan tetapi bila ditinjau dari keinginan orang-orang Arab, pendiri Jamiyatul Khair, mendirikan madrasah pada tahun 1901 dan menemui kegagalan, maka kemungkinan besar begitu organisasi itu berdiri maka didirikan pula madrasah. Pendapat ini dikuatkan dengan ditemukannya data bahwa pada tahun 1907, Jamiyatul Khair telah mengundang H. Muhammad Mansur, seorang ulama yang ahli Agama dan Bahasa Melayu.¹¹ Organisasi ini bertujuan untuk mendirikan perguruan agama Islam dengan menggunakan metode pengajaran moderen dan memberikan pelajaran umum di samping pelajaran agama.¹² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Jamiyatul Khair adalah organisasi pertama yang didirikan oleh orang bukan Belanda, yang keseluruhan kegiatan pendidikannya diselenggarakan berdasarkan sistem baru.¹³

Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam yang menggunakan sistem baru yang bermula di Jakarta itu secara berturut-turut diikuti oleh lahirnya beberapa lembaga pendidikan Islam formal lainnya di Pulau Jawa.

Terkait dengan masalah yang melatarbelakangi timbulnya fenomena madrasah di Indonesia, maka hal ini lebih baik kalau ditarik ke belakang, sejak pendidikan Islam di

Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy Central Sumatra 1784~1947, London: Curzon Press Ltd., 1987, 120--1.

⁹ H. M. D. Datuk Palimo Kayo, *Sejarah Perguruan Thawalib*, 5--6; lihat juga Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, 43; lihat hasil penelitian yang diadakan oleh Hamidin Dt. R. Endah dengan judul *Thawalib Padang Panjang dan Pembaharuan Pendidikan Islam*, Tesis, Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Jakarta, 1989, 58--60.

¹⁰ Organisasi ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1905. Anggota organisasi ini mayoritas adalah orang-orang Arab, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk setiap muslim. lihat Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, 159; lihat juga Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, 26 dan 59. Organisasi ini menurut Steenbrink, sejak berdirinya telah mempunyai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta telah mempunyai pengurus, seperti ketua, sekretaris dan bendahara sesuai dengan sistem organisasi modern.

¹¹ *Ibid.*, 60.

¹² Machnun Husein, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Nur Cahaya, 1983, 10. Pelajaran agama, menurutnya, adalah pelajaran yang materinya bersifat pengetahuan agama, sementara pelajaran umum adalah bersifat pengetahuan umum.

¹³ *Ibid.*, 64--5.

Indonesia dimulai. Pendidikan agama Islam sudah dimulai ketika penetrasi Islam ke Nusantara terjadi dan diperjuangkan oleh para pedagang dan dimantapkan oleh sufi. Para pedagang menyiarkan agama Islam kepada orang-orang yang mengelilinginya, yaitu mereka yang membeli barang dagangannya. Begitulah setiap ada kesempatan mereka memberikan pendidikan Islam.¹⁴ dan penetrasi itu menemui momentumnya ketika disebarluaskan oleh para sufi. H. J. Graff dalam hal ini mengatakan bahwa penetrasi Islam ke Indonesia melalui tiga cara, perdagangan, tasawuf, dan kekuasaan.¹⁵

Pendidikan Islam diberikan dengan perbuatan, contoh, dan suri tauladan. Mereka berlaku sopan santun, ramah tamah, tulus ikhlas, amanah, pengasih dan pemurah, jujur dan adil, menepati janji serta menghormati adat istiadat anak negeri. Dengan demikian, tertariklah penduduk negeri untuk memeluk agama Islam.¹⁶ Hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat orang sudah menjadi muslim. Baru kemudian sedikit demi sedikit diajarkan tentang tata cara sebagai muslim, baik berupa kewajiban maupun larangan.¹⁷

Pendidikan dan pengajaran Islam secara informal ini ternyata membawa hasil yang cukup baik dan bahkan menakjubkan, karena secara berangsur-angsur tersiar Agama Islam di seluruh Nusantara.¹⁸

Setelah Agama Islam semakin tersebar luas dan para pemeluknya mulai merasakan perlunya peningkatan kualitas keislamannya, maka mulailah pendidikan agama Islam. Segenap anggota keluarga berusaha mencari ilmu, uatamanya anak-anak mereka suruh pergi ke langgar, surau, dan masjid untuk memperoleh pendidikan agama dari para guru.¹⁹ Di pusat-pusat pendidikan itu, sejumlah murid berkumpul, baik besar maupun kecil, duduk di lantai atau tikar, menghadap sang guru untuk belajar mengaji. Pengajaran biasanya diberikan pada waktu petang hari atau malam hari, karena waktu siangnya anak-anak sibuk membantu orang tuanya bekerja di ladang atau di sawah, sementara gurunya bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan agama pada anak-anak itu tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari, baik bagi orang tua, anak-anak maupun guru sendiri. Itulah sebabnya, pelajaran agama dan latihan pelaksanaan beragama itu mendapat dukungan dari orang tua, guru, bahkan masyarakat kampung atau desa itu.²⁰

Para pemeluk Islam yang masih *muallaf* itu ingin mengetahui dengan lebih baik bagaimana ajaran Islam sebenarnya. Mereka berkemauan untuk pandai shalat, berdo`a, dan membaca Alquran. Dari sinilah mulai tumbuh pendidikan agama Islam. Pada mulanya mereka belajar di rumah-rumah *ustadz*, langgar, masjid, dan kemudian berkembang menjadi

¹⁴Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, 133-4 dan 209.

¹⁵H. J. De Graff, "Islam di Asia Tenggara sampai Abad ke-18", dalam Azyumardi Azra (ed.), *Perspektif Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989, 2.

¹⁶Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan*, 13.

¹⁷Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, 133-4 dan 209.

¹⁸Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan*, 14.

¹⁹Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, 133-4 dan 209.

²⁰Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900~1942*, Jakarta: LP3ES, 1995, 15.

pesantren, surau, maupun meunasah²¹Tempat-tempat pendidikan Islam inilah yang menjadi embrio terbentuknya sistem pendidikan Islam yang formal, madrasah dan sekolah yang berdasar keagamaan.²²

Akibat penjajahan, di mana pihak penjajah tidak menghiraukan masalah pendidikan bagi rakyat Indonesia, mengakibatkan para ulama dan pembaharu memikirkan perbaikan sistem pendidikan. Pesantren, langgar, surau, dan rangkang tidak dianggap perlu oleh penjajah, dan bahkan dihalang-halangi. Lembaga-lembaga pendidikan itu, menurut penjajah, hanya merupakan alat meninggikan akhlak rakyat saja dan sumber semangat perjuangan rakyat. Oleh karena itu diadakanlah peraturan umum tentang persekolahan, yang mengatur tentang pengawasan. Isi pokok dari peraturan itu adalah tidak diperkenankan memberi pelajaran tanpa seijin Gubernur Jenderal. Dengan adanya perubahan dari politik eksploitasi kepada politik etis pada tahun 1901, sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial terbagi menjadi beberapa bagian, sekolah untuk keturunan Belanda, Bangsawan Bumi Putera, dan juga memberi kesempatan kepada golongan rakyat biasa.²³

Politik Etis yang berintikan peningkatan pendidikan dan emansipasi bangsa Indonesia secara berangsur dan diusahakan untuk mencapai kesejahteraan melalui irigasi, transmigrasi, reformasi, pendewasaan, perwakilan, dan ditumpukan kepada pendidikan²⁴ ternyata tidak memperhatikan pendidikan agama. Sekolah yang berlebelkan agama dibiarkan hidup sendiri, tanpa pengakuan apa-apa kecuali dicurigai dan dikekang. Pesantren dibiarkan hidup tanpa bantuan.²⁵

Jauh sebelum politik etis dikembangkan, tepatnya pada tahun 1825, Belanda telah mendirikan sekolah di Padang dengan biaya 50 Gulden perbulan. Sekolah yang didirikan pada tahun 1825 itu, harus tutup 3 tahun kemudian karena tiadanya murid akibat mereka dilarang membaca al-Qur`an oleh Evans, gurunya yang beragama Kristen.²⁶

Semua pelajaran diberikan dalam Bahasa Melayu yang dimulai dari tingkat yang paling rendah. Agama sebagai mata pelajaran dilarang. Murid diharuskan berpakaian ala Eropa. Steinmetz dalam hal ini mengatakan bahwa murid-murid sekolah nagari maupun administratif itu dididik untuk menjadi pemeluk Kristen dan menjadi pasukan kolonial, dan juga sebagai tenaga sipil di perkebunan kopi.²⁷

Ketidak pedulian Pemerintah Kolonial terhadap pendidikan agama menjadikan umat Islam terutama ulamanya anti terhadap pendidikan Pemerintah dan berusaha mempertahankan Lembaga Pendidikan Islam. Pendidikan yang diciptakan Pemerintah untuk anak Pribumi

²¹Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*, Jakarta: Dharma Bhakti, 1984, 14.

²²Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, 212.

²³Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah*., 14.

²⁴S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, 18.

²⁵Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah*., 14.

²⁶Elizabeth E. Graves, *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century*, New York: Cornell University, 1981, 78.

²⁷*Ibid.* 80.

hanyalah untuk memperoleh tenaga kerja yang dapat dibayar murah. Keadaan yang seperti ini mengakibatkan adanya jurang pemisah yang semakin dalam, di mana pemerintah hanya menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi kepada intelektual, sementara umat Islam kebanyakan menyelenggarakan yang berorientasi keakhiratan.²⁸

Keadaan seperti ini diantisipasi dan dicarikan solusinya oleh para ulama sehingga munculah babak baru dengan didirikannya madrasah, yang diselenggarakan lebih baik dan teratur. Meskipun kurikulumnya telah diatur dan direncanakan, namun ternyata tetap seperti sebelumnya, sampai akhirnya diadakan pembaharuan.

Kebanyakan ulama yang mencarikan solusi terhadap masalah di atas adalah mereka yang pernah mengenyam pendidikan di Timur Tengah. Tokoh sentral yang mempunyai pengaruh besar dalam melahirkan pembaharuan Islam, khususnya di Sumatra Barat, adalah Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Hampir seluruh penuntut ilmu di Mekkah dari Kepulauan Nusantara pernah berguru kepadanya. Di antara murid-muridnya yang kembali ke daerah asalnya di Minangkabau dan memelopori gerakan pembaharuan adalah Muhammad Thaib Umar, Abdullah Ahmad, Abdul Karim Amrullah, Daud Rasyidi, Abdul Latief Syukur, Abbas Abduallah, Ibrahim Musa Parabek, Aguys Salim dan Sutan Darap Pariaman.²⁹

Banyaknya orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya, atau bahkan dirinya sendiri pergi menunaikan ibadah Haji dan meneruskan mukimnya di Makkah, karena adanya peningkatan ekonomi dengan meningkatnya hasil perkebunan dan kemudahan transportasi ke Timur Tengah.

Melihat kenyataan ini dapat dikatakan bahwa madrasah mempunyai fungsi sebagai penghubung antara sistem lama dengan sistem baru, dan juga berfungsi sebagai pembaharuan yang berusaha untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan zamannya. Kalau dilihat dari segi pembentukan dan kurikulumnya, madrasah dapat dikatakan berintikan sistem pesatren ditambah beberapa materi ilmu umum, seperti sejarah, ilmu hayat, ilmu bumi, ilmu hitung. Lulusannya memperoleh ijazah dan materi pelajaran yang diberikan dalam takaran yang sudah ditetapkan yang dianggap bisa diserap oleh kelompok umur tertentu. Gurunya merupakan guru bidang dan disiplin ilmu dispesifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi bidang kajian yang spesifik. Evaluasi lebih bersifat alat untuk menentukan tingkat dan kategori kecakapan, sehingga lulusan madrasah dianggap sama dengan sekolah umum.³⁰

Di antara para ulama yang berjasa dalam perkembangan madrasah di Indonesia adalah Syekh Abdullah Ahmad di Padang, KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, KH. Wahab Hasbullah bersama KH. Mas Mansur di Surabaya, Rangkayo Rahman Al-Yunusi di Padang Panjang, KH. Hasyim Asy`ari di Tebuireng Jombang.³¹ Sementara organisasi-organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan dan banyak mendirikan madrasah dan juga sekolah-sekolah umum dengan nama, jenis dan tingkatan yang bermacam-macam adalah:

Jamiyat al-Khair pada tahun 1905 mendirikan beberapa madrasah di Jakarta

²⁸*Ibid.*, 16.

²⁹Burhanuddin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam*, 77.

³⁰Aboebakar, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*, Jakarta, 1957, 231.

³¹Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah*., 16.

Muhammadiyah pada tahun 1912 mendirikan madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Muallimin/Muallimat, Muballighin, Muballighat, dan Madrasah Diniyah.

Al-Irsyad pada tahun 1913, mendirikan Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tajhidiah, Muallimin, dan Tahasus.

Matlaul Anwar di Menes Banten mendirikan Madrasah Intidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, dan Diniyah.

Persatuan Umat Islam pada tahun 1927 mendirikan Madrasah Diniyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Pertanian

Persatuan Tarbiyah Islamiyah pada tahun 1928 mendirikan madrasah dengan berbagai nama, Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Madrasah Awaliyah, sanawiyah, Kulliyah Syari`h.

Nahdlatul Ulama mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wusta, dan Muallimin Ulyah.

Jamiyatul Washiliyah pada tahun 1930 di medan mendirikan Madrasah Tajhiliyah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Qism al-Ali, dan Tahasus.

Hanya yang menjadi masalah adalah apakah lembaga-lembaga pendidikan yang tersebut di atas bisa dikategorikan madrasah atau tidak. Karena kebanyakan mereka jarang menyebut lembaga pendidikannya dengan madrasah, karena mereka menganggap bahwa madrasah adalah sebutan lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh kaum tradisionalis, setelah pesantren ataupun surau. Sementara mereka menyebutkan sekolah dengan menambah materi pelajarannya dengan pelajaran agama. Hal ini bisa diketahui dengan dikembangkannya nama sekolah-sekolah itu dengan nama-namka Belanda, seperti yang terjadi di Sumatra.

Madrasah sebagai tempat belajar, sampai menjelang berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia memiliki berbagai bentuk, jenjang, dan tingkatan. Bahkan karena pengajarannya tidak terlepas dari pendirinya masing-masing, maka madrasah tidak pernah memperoleh uniformitas dalam kurikulum.

Pada masa pendudukan Jepang, perkembangan madrasah tidak mengalami hambatan, bahkan pendidikan agama di sekolah umum diizinkan, walaupun guru pendidikan agama yang mengajarkan pendidikan agama tidak digaji oleh pemerintah Jepang.³²

Terkait dengan apa yang diperbaharui oleh sistem pendidikan Islam yang bercirikan klasikal ini adalah, *Pertama*, materi pelajaran yang diberikan oleh sistem pendidikan surau, pesantren, dan lainnya hanya materi pelajaran agama, utamanya Al-Qur`an dan pelajaran yang terkait dengan ibadah dan Bahasa Arab, sementara madrasah di samping memberikan materi pelajaran agama juga pelajaran umum, misalnya Bahasa Asing, Bahasa Belanda atau Bahasa Inggris, ilmu bumi, dan ilmu hitung; *Kedua*, Pengajaran sebelumnya berlangsung secara *halaqah*, siswa duduk di lantai, tanpa bangku, dan tidak menggunakan papan tulis, sedangkan madrasah menggunakan sistem klasikal, menggunakan bangku dan papan tulis. *Ketiga*, pada sistem pendidikan sebelumnya setiap murid bebas menentukan materi yang disenangi, yang tidak membedakan umur dan kualitas pemahamannya, maka madrasah sesuai dengan sistem klasikal diatur sesuai dengan kualitas murid. *Keempat*, Orintasi sistem pendidikan

³²*Ibid.*, 18.

sebelumnya lebih kepada hafalan, sementara madrasah lebih kepada pemahaman; *Kelima*, Tenaga pengajar sistem pendidikan lama hampir mengajar untuk semua materi pelajaran, sementara madrasah tenaga pengajar disesuaikan dengan keahliannya. dan Terakhir, sistem pendidikan sebelum tidak banyak mengenal evaluasi secara formal, sementara madrasah menggunakan evaluasi secara formal.

Untuk lebih jelasnya akan penulis kutipkan pendapat Mahmud Yunus yang menguraikan tentang perbedaan antara sistem pendidikan Islam lama, *halaqah*, dengan sistem pendidikan Islam baru sebagai berikut:

NO	SISTEM LAMA	NO	SISTEM BARU
01	Pelajaran ilmu-ilmu itu diajarkan satu demi satu	01	Pelajaran ilmu-ilmu di-himpunkan 2 sampai dengan 6 ilmu sekaligus
02	Pelajaran Ilmu Sharaf didahulukan dari pada Ilmu Nahw	02	Pelajaran Ilmu didahulukan atau disamakan dengan Ilmu Sharaf
03	Buku pelajaran yang mula-mula dikarang oleh Ulama Indonesia serta diterjemahkan dengan Bahasa Melayu	03	Buku pelajaran semuanya karangan ulama Islam dahulu kala, dan dalam Bahasa Arab
04	Kitab-kitab itu umumnya tulisan tangan	04	Kitab-kitab itu umunya cetakan
05	Pelajaran suatu ilmu hanya diajarkan berdasarkan satu macam kitab	05	Pelajaran suatu ilmu diajarkan dalam beberapa macam kitab: rendah, menengah, dan tinggi
06	Toko Kitab belum ada, hanya ada orang pandai yang menyalin kitab dengan tulisan tangan	06	Toko-toko kitab telah ada yang dapat memesan kitab dari Mesir atau Mekkah
07	Ilmu agama sedikit sekali karena sedikit bacaan	07	Ilmu Agama telah luas berkembang karena telah banyak kitab bacaan
08	Belum lahir aliran baru dalam Islam	08	Mulai lahir aliran baru dalam Islam yang dibawa oleh Majalah al-Manar di Mesir ³³

Perkembangan Madrasah pada Kurun Waktu Selanjutnya

Kebangkitan dan perkembangan madrasah di Indonesia sejalan dengan perkembangan dan sejarah bangsa dan umat Islamnya. Orang-orang Islam yang mampu mengirimkan

³³Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan*, 59.

anaknya untuk studi di Timur Tengah, seperti Mesir, Mekkah, dan Madinah semakin meningkat. Demikian juga mereka banyak yang menunaikan ibadah haji dan di antaranya bermukim di tanah suci dalam beberapa waktu. Pada permulaan abad ke-20, mereka yang kembali ke Indonesia membawa pikiran-pikiran yang baru untuk memperkenalkan sistem pendidikan yang banyak dilaksanakan di tanah suci kepada Umat Islam.³⁴

Persoalan pendidikan Islam juga menjadi pemikiran umat Islam setelah kemerdekaan RI 1945. Beberapa upaya dijalankan untuk menjawab bagaimana pendidikan Islam itu mampu menghadapi tantangan zaman tapi masih kuat dan tekun beragama. Untuk keperluan itu, kalangan tokoh Islam mengharapkan kepada pemerintah untuk dapat memberikan bimbingan kepada madrasah dan sekolah-sekolah Islam dalam mengembangkan sistem pendidikan yang sehat; membimbing sekolah-sekolah “umum” dalam memberikan pelajaran agama, dan mendirikan sekolah-sekolah swasta serta umum.³⁵

Kelemahan-kelemahan madrasah dan sekolah Islam adalah lulusan-lulusannya yang belum memenuhi standar waktu itu. Hal ini karena belum adanya buku standar sebagai kurikulum, masalah administrasi yang lemah, para guru yang tidak profesional, di mana mereka hanya berniat untuk mengembangkan agama, sementara pihak pengelola tidak memperhatikan kesejahteraannya. Dan kebanyakan murid madrasah dituntut untuk menguasai ilmu secara verbal, sehingga wajar kalau kebanyakan mereka menjadi ahli pidato dan khutbah yang cukup ulung.³⁶

Bagaimanapun juga, madrasah dapat dikatakan cukup berkembang dengan pesat setelah kemerdekaan. Pemerintah telah menempatkan agama sebagai fondasi dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga dan keempat, bahwa kemerdekaan Indonesia adalah semata-mata atas berkat dan rahmat Allah dan Pancasila yang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar negara. Kemudian dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³⁷

Badan Pekerja Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) sebagai badan legislatif pada waktu itu, dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia mengambil kebijaksanaan dan langkah-langkah sebagai berikut:

Memajukan pendidikan dan pengajaran, baik di lembaga informal, non-formal maupun formal, begitu pengumuman yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 1945, berita RI tahun II No. 4 dan 5 hal 20 kolom 1.

Pada tanggal 27 Desember 1945 BPKNIP menyarankan agar pendidikan agama di sekolah-sekolah mendapat tempat yang teratur, seksama dan mendapat perhatian yang semestinya.

³⁴*Ibid.*, 16.

³⁵Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam*, 53.

³⁶*Ibid.*

³⁷C. S. T Kansil ., *Mendalami P4, UUD 1945, dan GBHN*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985, 428.

Lembaga Pendidikan Madrasah dan Pesantren mendapat bantuan, diperhatikan, oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena pemerintah menyadari bahwa kedua jenis pendidikan ini adalah alat mencerdaskan bangsa.

Sebagai realisasi dari agama sebagai fondasi dalam membangun bangsa dan negara (azas Ketuhanan Yang Maha Esa) dalam bidang eksekutif pada tanggal 3 Januari 1946 berdiri Departemen Agama, pengurusan mengenai penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum dan pengurusan lembaga pendidikan agama semisal madrasah, pesantren menjadi salah satu tugas pokoknya.

Pada tanggal 2 Oktober 1946 sampai dengan 27 Juni 1947, Menteri PP dan K mengadakan Musyawarah yang bertujuan untuk memperbaharui pendidikan dan pengajaran, di antaranya merekomendasikan, bahwa lembaga pendidikan agama, baik pesantren maupun madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasikan serta diberikan bantuan biaya.³⁸

Eksistensi lembaga pendidikan agama sebagai bagian dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950, di mana dinyatakan bahwa belajar di madrasah yang telah mendapat pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.³⁹ Departemen Agama dalam rangka melaksanakan UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran di atas, pada tahun 1958/1959 mengadakan pembaharuan sistem pendidikan pada madrasah dengan memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar. Lama belajarnya 8 tahun dan bertujuan menunjang kemajuan ekonomi, industri, dan transmigrasi. Disiplin ilmu yang diberikan di samping ilmu pengetahuan agama, umum, juga ketrampilan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa setelah tamat, sekitar umur 15 tahun, anak sudah dapat bekerja sesuai dengan UU Perburuan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1963 konsep Madrasah Wajib Belajar sebagai sistem pendidikan agama waktu itu diintegrasikan ke dalam madrasah ibtidaiyah, yang lama belajarnya 6 atau 7 tahun. Pendidikan ketrampilan sebagaimana cita-cita MWB dijalankan melalui kelas masyarakat yang kemudian diganti dengan nama kelas pembangunan seperti yang berlaku di lingkungan Departemen P & K.

Ketetapan MPRS No.II/1960 Lampiran B (3) antara lain menyebutkan, madrasah hendaknya berdiri sebagai badan otonom di bawah Departemen Agama dan bukan di bawah pengawasan Departemen P & K, sedangkan dalam UU Pokok Pendidikan No. 4/50 jo.12/54 pasal 10 ayat 2 menyebutkan, belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.⁴⁰

Pada tahun 1966 MPRS bersidang lagi. Suasana pada waktu itu yang sedang membersihkan sisa-sisa mental G 30 S/PKI, ikut mempengaruhi keputusannya. Pendidikan Agama yang semula tidak menjadi mata pelajaran wajib, akhirnya diwajibkan. Dengan demikian, sejak tahun 1966 pendidikan Agama menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh siswa dan mahasiswa negeri.

³⁸Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah.*, 19.

³⁹Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, 236.

⁴⁰Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah.*, 21.

Kehidupan sosial, agama, dan politik di Indonesia sejak tahun 1966, menurut Zuhairini dkk., mengalami perubahan yang sangat besar. Periode ini disebut Orde Baru dan zaman munculnya Angkatan Baru yang disebut Angkatan 66. Pemerintah Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 dan melaksanakannya secara murni. Pemerintah dan rakyat akan membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Yakni membangun bidang rohani dan jasmani untuk kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.⁴¹

Selanjutnya Zuhairini menjelaskan bahwa berdasarkan tekad dan semangat tersebut membuat kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973~1978 dan 1983 selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua tingkat pendidikan.⁴²

Sejalan dengan pembangunan yang semakin meningkat dan kemajuan-kemajuan yang dicapai, maka madrasah selalu ditingkatkan kualitasnya agar lulusan-lulusannya bisa diterima masyarakat yang selalu berkembang. Untuk itu dikeluarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (SKB3M), yaitu Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri tertanggal 24 Maret 1975 yang berisikan, Mata Pelajaran di Madrasah ditetapkan 70 % untuk mata pelajaran umum dan 30 % mata pelajaran agama. Adapun tujuan pokok dari SKB3M adalah agar mutu pengetahuan umum bagi siswa madrasah bisa sama dengan mutu pengetahuan umum siswa sekolah-sekolah pada umumnya. Terkait dengan keputusan ini, maka ijazah madrasah dianggap sama dengan ijazah sekolah pada umumnya, di mana Madrasah Ibtidaiyah dianggap sama dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah dengan SMTP dan Madrasah Aliyah dengan SMTA.⁴³

SKB3M ternyata banyak dipermasalahkan oleh sebagian besar umat Islam utamanya ulamanya, karena dianggap SKB3M itu membuat siswa serba tanggung, tidak mengerti dengan baik pengetahuan agama, juga umum, sehingga akan mengakibatkan kelangkaan Ulama. Untuk mencari solusinya, maka Departemen Agama, di masa Menteri Munawir Sjadzali, menderikan Madrasah Aliyah Program Khusus. Madrasah ini diharapkan agar MAPK ini bisa menjadi lembaga mencetak calon ulama yang mengerti agama dengan baik juga pengetahuan umum, utamanya bahasa Arab dan Inggris.

Pertumbuhan dan perkembangan Madrasah di Indonesia yang terakhir, sebagai dari realisasi dari Surat Edaran Bersama antara Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, mulai tahun pelajaran 1993~1994 untuk pertama kalinya Madrasah dan Sekolah Umum dari tingkat SD sampai SMTA menyelenggarakan EBTANAS secara bersama-sama. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan murid-murid Madrasah yang ingin melanjutkan ke sekolah umum tidak perlu mengikuti ujian lagi.

⁴¹Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, 155.

⁴²*Ibid.*, 156.

⁴³*Ibid.*, 231.

Penutup

Madrasah di Indonesia, asal usulnya dari pendidikan yang diselenggarakan masyarakat baik berupa surau, pesantren, rangkang, maupun lainnya. Madrasah muncul karena adanya tantangan dari Belanda sehubungan dengan politik etisnya, di samping juga didorong adanya usaha penyempurnaan sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum terutama kesempatan kerja pada pemerintah kolonial Belanda serta adanya sikap mental pada sementara golongan Islam, khususnya para santri yang terpukau kepada Barat di bidang ilmu, ekonomi, dan tehnologi.

Para Ulama banyak yang berjasa dalam perkembangan madrasah. Demikian pula organisasi Islam banyak mendirikan madrasah, atau setidaknya sekolah yang ditambah mata pelajaran agama, antara lain: Muhammadiyah, Jam`iyat al-Khair, Al-Irsyad, Mathla` al-Anwar, Persatuan Umat Islam, PERTI, Nahdlatul Ulama, Jamiyatul Wasiliyah.

Surau atau pesantren yang pertama kali diperbaharui menjadi sistem madrasah, atau setidaknya sekolah, adalah Surau Jembatan Besi menjadi Perguruan Thawalib pada tahun 1914. Sementara madrasah pertamanya adalah Jamiyatul Khair.

Pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia mendapat pengaruh dari para Ilmuwan dari Timur Tengah dan para Jama`ah Haji yang bermukim di Tanah Suci. Setelah para Haji itu kembali ke Indonesia, dan juga sistem pendidikan yang dikembangkan oleh kolonial di Nusantara.

Perkembangan madrasah di Indonesia adalah kurang menggembirakan, hal ini disebabkan banyaknya beban yang diberikan kepadanya, di samping mengajarkan pendidikan umum juga pendidikan agama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aboebakar, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*. Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. KHA. Wahid Hasyim, 1957.
- Azra, Azyumardi, *The Rise and the Decline of the Minangkabau Surau: A Traditional Islamic Educational Institution in West Sumatra during the Dutch Colonial Government*. Thesis, Columbia University, 1988).
- , "Surau di Tengah Krisis: Pesantren dalam Perspektif Masyarakat", dalam M. Dawam Raharjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah*. Jakarta, P3M, 1985.
- Daya, Burhanuddin, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- De Graaf, H. J., "Islam di Asia Tenggara sampai Abad ke-18", dalam Azyumardi Azra (ed.), *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989.
- Dobbin, Cristine, *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy Central Sumatra 1784-1987*. London: Curzon Press, 1987.
- Endah, Hamidin Dt. R., *Thawalib Padang Panjang dan Pembaharuan Pendidikan Islam*. Tesis, Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1989.
- Graves, Elizabeth E., *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century*. New York: Cornell University, 1981.
- Husein, Machnun, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Nur Cahaya, 1983.
- Kansil C. S. T., *Mendalami P4, UUD 1945, dan GBHN*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.
- Kayo, H. M. D. Datuk Palimo, *Sejarah Perguruan Thawalib Padang Panjang*. Yayasan Thawalib, 1970.
- Nasution, S., *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- , *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900~1942*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Shaleh, Abdurrahman, *Penyelenggaraan Madrasah: Peraturan Perundangan*. Jakarta: Dharma Bhakti, 1984.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1985.
- Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1995.